

INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TAHUN 2020-2024

(BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL NOMOR : PHN-02.PR.01.01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TAHUN 2020-2024)

1. ESELON I

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	Survei dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna. Survei diberikan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke website jdihn.bphn.go.id	n/a	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan peninjauan analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pada tahun berjalan dibagi dengan rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya x	Rekomendasi adalah hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat	n/a	(20% Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan)	(20% Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan)	(20% Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan)	(20% Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan)	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		100%	kebijakan.						
Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi X 100%	Bantuan Hukum Litigasi adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam perkara perdata, pidana dan TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	n/a	77%	81%	81%	81%	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai	Bantuan Hukum Non Litigasi adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi	n/a	79%	80%	80%	80%	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
	dengan peraturan perundang-undangan	peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi X 100%	bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam kegiatan penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum						

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Indeks kepuasan layanan penerima bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum	n/a	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	
Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Jumlah RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dibagi jumlah RUU di lingkungan Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 x 100%	RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah yang dapat masuk ke Prolegnas Prioritas Tahunan harus memenuhi tersedianya Naskah Akademik RUU yang telah diselaraskan	n/a	25% masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20% masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15% masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	10% masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Pusat Perencanaan Hukum Nasional

2. UNIT ESELON II, Eselon III dan Eselon IV:

a. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum	Survei dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna. Survei diberikan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke website bphn.jdihn.go.id	n/a	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Bidang Jaringan Informasi Hukum									
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Jumlah anggota JDIHN aktif dibagi dengan jumlah anggota	Yang dimaksud Anggota JDIHN aktif adalah Anggota JDIHN telah melakukan	n/a	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	Bidang Jaringan Informasi Hukum

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat		JDIHN kali 100 %	<p>pengelolaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh instansinya melalui website JDIH. dari jumlah 1157 anggota, sampai dengan tahun 2019 telah tercapai 566 anggota jdih yang aktif. Target setiap tahun 20% : $591 \text{ Anggota JDIHN} \times 100\% = 118 \text{ Anggota JDIHN/tahun.}$ Sehingga pada tahun 2024 seluruh anggota JDIHN sudah aktif mengelola Dokumen Hukum melalui website JDIHN</p>						

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah hasil Publikasi yang diterbitkan	Jumlah hasil publikasi yang diterbitkan dan terpublikasi dalam tahun berjalan sebanyak 14 terbitan.	Yang dimaksud dengan Hasil Publikasi adalah Dokumentasi / Informasi Hukum dalam bentuk jurnal, hasil evaluasi hukum, naskah akademik dan lainnya yang diterbitkan dan terpublikasi dalam tahun berjalan. Target setiap tahun 14 terbitan	n/a	14 informasi hukum	14 informasi hukum	14 informasi hukum	14 informasi hukum	Bidang Jaringan Informasi Hukum

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub Bidang Pemberdayaan dan penguatan Jaringan									
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Jumlah anggota JDIHN aktif dibagi dengan jumlah anggota JDIHN kali 100 %	Yang dimaksud Anggota JDIHN aktif adalah Anggota JDIHN telah melakukan pengelolaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh instansinya melalui website JDIH. dari jumlah 1157 anggota, sampai dengan tahun 2019 telah tercapai 566 anggota jdih yang aktif. Target setiap tahun 20% : 591 Anggota JDIHN x 100% = 118 Anggota JDIHN/tahun. Sehingga pada	n/a	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	Sub Bidang Pemberdayaan dan penguatan Jaringan

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			tahun 2024 seluruh anggota JDIHN sudah aktif mengelola Dokumen Hukum melalui website JDIHN.						
Sub Bidang Penerbitan dan Publikasi Hukum									
	Jumlah hasil Publikasi yang diterbitkan	Jumlah hasil publikasi yang diterbitkan dan terpublikasi dalam tahun berjalan sebanyak 14 judul terbitan.	Yang dimaksud dengan Hasil Publikasi adalah Majalah Hukum Nasional (2 Edisi), Jurnal Hukum Bahasa Inggris (2 Edisi) dan Hasil kegiatan lainnya yang diterbitkan dan terpublikasi dalam tahun berjalan. Target setiap tahun 14 Judul terbitan	n/a	14 informasi hukum	14 informasi hukum	14 informasi hukum	14 informasi hukum	Sub Bidang Penerbitan dan Publikasi Hukum

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Bidang Pelayanan Informasi Hukum									
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan perpustakaan	Survei dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan layanan perpustakaan	n/a	76,61%	76,61%	76,61%	76,61%	Bidang Pelayanan Informasi Hukum
Sub Bidang Pengumpulan dan Pemeliharaan Koleksi									
	Persentase ketersediaan bahan dokumen hukum yang dikelola perpustakaan dalam jdihn.bphn.go.id	Jumlah koleksi yang dilayankan pada th berjalan dibagi koleksi keseluruhan di tahun berjalan X 100%	Yang dimaksud dengan koleksi yang dilayankan pda tahun berjalan adalah koleksi yang selesai diolah dan dilayankan kepada pemustaka	n/a	95% tersedia	95% tersedia	95% tersedia	95% tersedia	Sub bidang pengumpulan dan pemeliharaan koleksi

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub Bidang Sirkulasi dan Referensi									
	Persentase peningkatan pemustaka yang memanfaatkan layanan dokumen hukum	Jumlah pemustaka tahun berjalan dikurangi Jumlah pemustaka tahun sebelumnya dibagi jumlah pengunjung tahun sebelumnya dikali 100 persen	Persentase peningkatan jumlah pemustaka yang memanfaatkan pelayanan Perpustakaan baik secara offline maupun online	n/a	10% pemustaka meningkat	20% pemustaka meningkat	20% pemustaka meningkat	30% pemustaka meningkat	Sub bidang sirkulasi dan referensi
Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum									
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDIHN aktif tahun berjalan kali 100 %	Anggota JDIHN aktif yang terintegrasi adalah anggota JDIHN yang websitenya berhasil diintegrasikan dengan portal/sistem jdihn.go.id. Target setiap	n/a	20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN	Bidang Otomasi dokumentasi Hukum

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
diakses masyarakat			tahun 20% dari Anggota JDIHN aktif tahun berjalan x 100%. Sehingga pada tahun 2024 seluruh website anggota JDIHN sudah terintegrasi dengan portal/sistem jdihn.go.id.						
Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum									
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDIHN aktif tahun berjalan kali 100 %	Anggota JDIHN aktif yang terintegrasi adalah anggota JDIHN yang websitenya berhasil diintegrasikan dengan portal/sistem jdihn.go.id. Target setiap tahun 20% dari Anggota JDIHN	n/a	20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN	Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			aktif tahun berjalan x 100%. Sehingga pada tahun 2024 seluruh website anggota JDIHN sudah terintegrasi dengan portal/sistem jdihn.go.id.						
Sub Bidang Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum									
	Persentase dokumen hukum yang diolah dalam portal/sistem JDIHN yang terintegrasi	Jumlah dokumen hukum Anggota terintegrasi yang diolah dalam basis data nasional (Portal JDIHN) pada tahun berjalan dibagi jumlah dokumen hukum dalam website anggota JDIHN	Dokumen hukum yang diolah dalam portal/sistem yang terintegrasi yaitu, dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIHN yang terintegrasi.	n/a	100% dokumen hukum	100% dokumen hukum	100% dokumen hukum	100% dokumen hukum	Sub bidang pengolahan dokumen dan informasi hukum

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		terintegrasi pada tahun berjalan dikali 100%.							

b. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya yang dimanfaatkan oleh pembuat	Rekomendasi adalah hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-	n/a	(20% Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan)	(20% Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan)	(20% Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan)	(20% Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan)	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		kebijakan pada tahun berjalan dibagi dengan rekomendasi hasil Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya x 100%	undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan.						
	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	Dokumen Pembangunan Nasional adalah kompilasi hasil kegiatan analisis dan evaluasi Hukum yang dilakukan oleh kelompok kerja analisis dan evaluasi yang berisi arah pembangunan hukum, rencana dan strategi	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			pembangunan hukum nasional ke depan, dan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan.						
	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum yang meliputi Kemampuan Manajemen, Sosiokultural dan Teknis	n/a	n/a	80%	80%	80%	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan									
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang direkomendasikan oleh bidang Politik, Keuangan, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan.	n/a	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan I									
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan oleh sub bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan I	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh sub bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan I	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan	n/a	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	Sub bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan I

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan II									
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan oleh sub bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan II	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh sub bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan II	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan	n/a	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	Sub bidang politik, hukum, keamanan dan pemerintahan II

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur									
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang direkomendasikan di bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan.	n/a	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur I									
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan oleh sub bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur I	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh sub bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur I	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan	n/a	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	Sub bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur I

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur II									
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan oleh sub bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur II	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh sub bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur II	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan	n/a	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	Sub bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan dan Infrastruktur II

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup									
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang direkomendasikan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan.	n/a	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup I									
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan oleh sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup I	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup I	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan	n/a	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup I

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup II									
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan oleh sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup II	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup II	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan	n/a	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup II

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Bidang Sosial Budaya									
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang direkomendasikan di bidang sosial dan budaya	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh bidang sosial dan budaya	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan.	n/a	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	50 Peraturan Perundang-undangan	Bidang Sosial Budaya

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub Bidang Sosial Budaya I									
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan oleh sub bidang sosial budaya I	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh sub bidang sosial budaya I	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan	n/a	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	Sub bidang Sosial Budaya I

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub Bidang Sosial Budaya II									
	Jumlah peraturan perundang-undangan yang direkomendasikan oleh sub bidang sosial budaya II	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di analisis dan evaluasi oleh sub bidang sosial budaya II	Rekomendasi adalah hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, berupa: perubahan, pencabutan dan penggantian peraturan perundang-undangan, dan/atau tindakan lainnya dalam rangka efektifitas peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan	n/a	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	25 Peraturan Perundang-undangan	Sub bidang Sosial Budaya II

c. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah x 100 %	Desa/kelurahan sadar hukum adalah desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum	n/a	70% Desa/ Kelurahan	70% Desa/ Kelurahan	70% Desa/ Kelurahan	70% Desa/ Kelurahan	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum		76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	
	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar	Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang telah mengikuti	Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum	n/a	80%	80%	80%	80%	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
	kompetensi	kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	merupakan ukuran kriteria kemampuan meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang penyuluhan hukum.						
Bidang Pembudayaan Hukum									
Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Persentase desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah x	Desa/kelurahan sadar hukum adalah desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan	n/a	70% Desa/ Kelurahan	70% Desa/ Kelurahan	70% Desa/ Kelurahan	70% Desa/ Kelurahan	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		100%	sadar hukum						
Sub Bidang Penyuluhan Langsung dan Tidak Langsung									
	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung kepada masyarakat	Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan budaya hukum masyarakat	Kegiatan penyuluhan hukum langsung yang dilaksanakan meliputi: Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu; Temu Sadar Hukum; Penyuluhan Hukum Keliling dan Konsultasi. Hukum. Sedangkan kegiatan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung meliputi kegiatan Talkshow di Radio dan Pameran Penyuluhan Hukum	n/a	65 kegiatan	80 kegiatan	95 kegiatan	150 kegiatan	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Sub Bidang Pembinaan Desa Sadar Hukum									
	Persentase desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah x 100%	Desa/kelurahan sadar hukum adalah desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum	n/a	70% Desa/ Kelurahan	70% Desa/ Kelurahan	70% Desa/ Kelurahan	70% Desa/ Kelurahan	
BIDANG PENYULUHAN HUKUM									
	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan ukuran kriteria kemampuan meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk	n/a	80%	80%	80%	80%	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang penyuluhan hukum.						
Sub Bidang Fasilitasi Penyuluh Hukum									
	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan ukuran kriteria kemampuan meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang penyuluhan	n/a	80%	80%	80%	80%	

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			hukum.						
Sub Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum									
	Pengembangan modul Penyuluhan Hukum	Jumlah modul Penyuluhan Hukum	Modul Penyuluhan Hukum adalah satuan ukuran atau standar bahan penyuluhan hukum dalam bentuk cetak, elektronik dan pengembangan sistem informasi Penyuluh Hukum	n/a	3 modul	3 modul	3 modul	3 modul	Sub Bidang Pengembangan Hukum
BIDANG BANTUAN HUKUM									
Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Jumlah Pengelolaan Program Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah	Jumlah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mengelola anggaran Program Bantuan Hukum di wilayah	Bantuan Hukum Litigasi adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam perkara perdata, pidana	n/a	33 Kantor Wilayah	33 Kantor Wilayah	33 Kantor Wilayah	33 Kantor Wilayah	Bidang Bantuan Hukum

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			dan TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum Non Litigasi adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam kegiatan penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar peradilan,						

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			dan drafting dokumen hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum						
	Indeks kepuasan layanan penerima bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum	n/a	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	
Sub Bidang Program Bantuan Hukum									
	Jumlah Pengelolaan Program Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah	Jumlah wilayah yang mengelola Program Pemberian Bantuan Hukum	Bantuan Hukum Litigasi adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam perkara perdata, pidana	n/a	33 Kantor Wilayah	33 Kantor Wilayah	33 Kantor Wilayah	33 Kantor Wilayah	Sub Bidang Program Bantuan Hukum

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			<p>dan TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum Non Litigasi adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum dalam kegiatan penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar peradilan,</p>						

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			dan drafting dokumen hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum						
Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum									
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum	n/a	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	76,61 (Baik)	Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum

d. Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Jumlah RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dibagi jumlah RUU di lingkungan Pemerintah dalam Prolegnas 2020-2024 x 100%	RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah yang dapat masuk ke Prolegnas Prioritas Tahunan harus memenuhi tersedianya Naskah Akademik RUU yang telah diselaraskan	n/a	25% masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20% masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15% masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	10% masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Pusat Perencanaan Hukum Nasional
Bidang Perencanaan Legislasi									
Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP, Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	Jumlah dokumen Prolegnas di lingkungan Pemerintah; Jumlah dokumen Progsun PP Perpres yang akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan; Jumlah dokumen fasilitasi	Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah, Program Penyusunan PP dan Perpres serta Program Legislasi Daerah sebagaimana yang diatur	n/a	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Bidang Perencanaan Legislasi

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
		perencanaan Perda	dalam UU No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014						
Sub Bidang Penyusunan Prolegnas									
	Jumlah dokumen perencanaan Undang-Undang yang sesuai dengan arah kebutuhan pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN) dan/atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen Prolegnas di lingkungan Pemerintah	Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sub Bidang Penyusunan Prolegnas

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab	
				2020	2021	2022	2023	2024		
Sub Bidang Penyusunan perencanaan PP dan Perpres dan Fasilitasi Prolegda										
	Jumlah dokumen perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda yang sesuai dengan amanat delegasi PUU dan/atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dokumen Progsun PP Perpres yang akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan dan Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan Perda	Program Penyusunan PP dan Perpres serta Fasilitasi Prolegda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sub Bidang Penyusunan perencanaan PP dan Perpres dan Fasilitasi Prolegda
Bidang Penyusunan Naskah Akademik										
Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Jumlah Naskah akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	Jumlah Naskah akademik yang disusun	Jumlah Naskah Akademik RUU adalah Naskah Akademik RUU yang tersusun berdasarkan jumlah usul prakarsa Pemerintah yang sesuai dengan daftar Prolegnas.	n/a	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Bidang Penyusunan NA
Sub Bidang Polhukam										
	Jumlah Naskah akademik bidang	Jumlah Naskah akademik yang	Jumlah Naskah Akademik RUU	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sub Bidang Polhukam

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Polhukam yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	disusun pada bidang Polhukam	adalah Naskah Akademik RUU yang tersusun berdasarkan jumlah usul prakarsa Pemerintah yang sesuai dengan daftar Prolegnas.						
Sub Bidang Ekuindag									
	Jumlah Naskah akademik bidang Ekuindag yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	Jumlah Naskah akademik yang disusun pada bidang Ekuindag	Jumlah Naskah Akademik RUU adalah Naskah Akademik RUU yang tersusun berdasarkan jumlah usul prakarsa Pemerintah yang sesuai dengan daftar Prolegnas.	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sub Bidang Ekuindag
Bidang Penyelarasan Naskah Akademik									
Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Jumlah Naskah akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	Jumlah Naskah Akademik RUU yang dimohonkan Penyelarasannya	Naskah akademik yang diselaraskan adalah NA RUU yang diajukan oleh Pemrakarsa untuk	n/a	7 Naskah Akademik	7 Naskah Akademik	7 Naskah Akademik	7 Naskah Akademik	Bidang Penyelarasan Naskah Akademik

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Penjelasan	Target					Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	
			memenuhi syarat dalam pengajuan Prolegnas tahunan						
Sub Bidang Polhukam									
	Jumlah Naskah akademik bidang POLHUKAM dan SDA LH dari Kementenan yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	Jumlah Naskah Akademik RUU bidang POLHUKAM dan SDA LH yang diselaraskan	Naskah akademik yang diselaraskan adalah NA RUU bidang POLHUKAM dan SDA LH yang diajukan oleh Pemrakarsa	n/a	4 Naskah Akademik	4 Naskah Akademik	4 Naskah Akademik	4 Naskah Akademik	Sub Bidang Polhukam
Sub Bidang Ekuindag									
	Jumlah Naskah akademik bidang EKUINDAGTUR dari Kementerian yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	Jumlah Naskah Akademik RUU bidang EKUINDAGTUR yang diselaraskan	Naskah akademik yang diselaraskan adalah NA RUU bidang EKUINDAGTUR yang diajukan oleh Pemrakarsa	n/a	3 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	Sub Bidang Ekuindag

e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
Kepala Kantor Wilayah								
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi X 100%	n/a	77%	81%	81%	81%	
	2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi X 100%	n/a	79%	80%	80%	80%	
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
		layanan bantuan hukum						
	4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Persentase Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah	n/a	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di 33 kantor wilayah	n/a	66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan	
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum	6. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Jumlah anggota JDIHN aktif dibagi dengan jumlah anggota JDIHN kali 100 %	n/a	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
masyarakat di wilayah								
Kepala Bidang Hukum								
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi X 100%	n/a	77%	81%	81%	81%	
	2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi X 100%	n/a	79%	80%	80%	80%	
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan	Survei kepuasan penerima bantuan	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
	hukum	hukum terhadap layanan bantuan hukum						
	4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Persentase Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah	n/a	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di 33 kantor wilayah	n/a	66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan	
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi	6. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Jumlah anggota JDIHN aktif dibagi dengan jumlah anggota JDIHN kali 100 %	n/a	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
hukum masyarakat di wilayah								
Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah								
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Jumlah perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di 33 kantor wilayah	n/a	66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan	
Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum								
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi X 100%	n/a	77%	81%	81%	81%	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
	2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi X 100%	n/a	79%	80%	80%	80%	
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	
	4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Persentase Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah	n/a	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	70% Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	
	5. Persentase anggota JDIHN yang	Jumlah anggota JDIHN aktif dibagi	n/a	20% anggota	20% anggota	20% anggota	20% anggota	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target					Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
	berpartisipasi aktif	dengan jumlah anggota JDIHN kali 100 %		JDIHN	JDIHN	JDIHN	JDIHN	